

INDEF: pemerintah perlu optimalkan belanja APBN

Rabu, 7 Februari 2018 16:21 WIB



Dokumentasi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada pimpinan rapat paripurna Taufik Kurniawan (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat Rapat Paripurna DPR ke-10 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017). DPR melalui rapat paripurna menyetujui RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menjadi undang-undang. (ANTARA/Wahyu Putro A) ()

Jakarta (ANTARA News) - Lembaga penelitian dan studi kebijakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memandang Pemerintah perlu mengoptimalkan peran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, menilai kontribusi konsumsi pemerintah dapat lebih ditingkatkan. Belanja pemerintah juga bisa dijadikan instrumen untuk pertumbuhan bagi sektor lain.

Optimalisasi tersebut penting meskipun kontribusi konsumsi pemerintah dalam struktur PDB 2017 sebesar 9,1 persen, lebih kecil dibandingkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 56,13 persen dan investasi 32,16 persen.

Eko mengatakan salah satu bentuk optimalisasi peran belanja APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong proporsionalitas penyerapan belanja antartriwulan.

Ia berpendapat belanja APBN akan punya daya dorong pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar apabila dialokasikan secara rata (flat) di tiap triwulan setiap tahun

dibandingkan alokasi besar-besaran di triwulan terakhir.

"Cara pemerintah berbelanja masih fluktuatif, biasanya di triwulan pertama masih rendah," ucap Eko.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,07 persen (year-on-year/yoy) dan merupakan yang tertinggi sejak 2014. Namun, pencapaian pertumbuhan ekonomi 2017 itu masih lebih kecil dari target 5,2 persen.

Sementara itu, belanja negara dalam APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.

Pewarta: Roberto Calvinantya Basuki

Editor: Kunto Wibisono